

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu prinsip dasar laporan keuangan sesuai kerangka konseptual pelaporan standar akuntansi keuangan yakni *full disclosure* atau menyediakan segala informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan penggunaannya (Kieso, Weygandt dan Warfield, 2014). Laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan harus dapat mengungkapkan kondisi perusahaan yang sebenarnya sehingga bermanfaat bagi para penggunaannya. Informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan haruslah informasi yang mempunyai relevansi yang juga merupakan salah satu karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi dari sebuah laporan keuangan. Manajemen merupakan pihak yang paling bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar pelaporan keuangan.

Dalam kaitannya dengan informasi akuntansi yang relevan, Francis dan Schipper (1999) dalam Sulistiawan (2011) mempublikasikan sebuah penelitian yang menjelaskan hubungan antara data akuntansi dan harga saham perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, dimana salah satu kategori dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh laba dan perubahan laba terhadap return saham. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hubungan positif antara nilai laba dan perubahan laba terhadap return saham. Jadi perusahaan yang mengalami peningkatan laba akan pula meningkatkan harga saham perusahaan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan, sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunistik manajemen untuk

memaksimalkan kepuasannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan oportunistis tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur, dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan keinginannya. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya tersebut dikenal dengan manajemen laba (*earnings management*).

Masalah manajemen laba merupakan masalah keagenan yang seringkali dipicu oleh adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemilik (pemegang saham) dengan pengelola (manajemen) perusahaan. Lebih jauh lagi, manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi tentang perusahaan lebih cepat, lebih banyak dan lebih valid daripada pemegang saham (*information asymmetry*) sehingga memungkinkan pada angka laba, yang dapat menciptakan kesan (prestasi) tertentu.

Terjadinya praktik manajemen laba salah satu penyebabnya adalah karena lemahnya penerapan *corporate governance* (Suryani, 2010). Untuk itu perlu dilakukan perbaikan agar dapat menghasilkan tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebut *Good Corporate Governance*. Tujuan *Good Corporate Governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Sutedi, 2011). Beberapa mekanisme *Corporate Governance* antara lain diwujudkan dengan adanya komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen.

Penelitian ini menggunakan BUMN sebagai objek penelitian karena peneliti merasa daya gerak BUMN terhadap ekonomi Nasional sangat besar.

Menurut Syakhroza (2005), dengan jumlah BUMN sebanyak 158 dan memiliki total asset sekitar 1,2 Triliyun Rupiah serta bergerak di berbagai bidang industri maka BUMN tentu memiliki kontribusi signifikan dalam mensukseskan target-target pembangunan nasional. Masalah *governance* dalam BUMN sering diidentikkan dengan kinerja keuangan yang buruk, daya saing rendah, tiada profesionalisme dan daya respons lemah terhadap lingkungan bisnis (Tjager dkk, 2004). Hal ini dibuktikan dengan total kerugian dari 26 BUMN pada tahun 2015 mencapai 11.7 Triliyun Rupiah (www.detik.com: 2015).

Fenomena mengenai adanya praktik manajemen laba pernah terjadi dalam kasus PT. Garuda Indonesia, ternyata sejak bulan Juni 2015 keuangan PT. Garuda Indonesia sudah dimanipulasi. PT. Garuda Indonesia (persero) diduga melakukan perubahan dalam laporan keuangan agar terlihat sehat. Dugaan perubahan ini terlihat dari salinan percakapan sebuah grup Whatsapp (baca:WA). Di dalam salinan percakapan itu sangat terlihat jajaran direksi atau BOD memberikan perintah kepada kepala unit dan kepala bagian akunting PT. Garuda Indonesia untuk memundurkan semua pembayaran hutang. Pemunduran ini dimaksudkan membuat laporan keuangan menjadi bagus. Dalam bait pertama, direktur keuangan (DF) menugaskan untuk melakukan identifikasi biaya-biaya non rutin bulan Juni 2015, agar dapat direvisi lebih maju bulan Juli atau Agustus 2015. Namun cara ini dengan syarat tidak mengganggu operasional secara signifikan. Selanjutnya, jika kesepakatan pengunduran hutang telah disepakati terutama dalam bentuk perjanjian, maka bisa direvisi untuk ditandatangani ulang dan akan efektif bulan Juli atau Agustus. Disini bukan hanya negosiasi pembayaran saja

melainkan efektivitas perjanjian dan transaksinya. Diakhir percakapan, sangat tegas pernyataan yang dikatakan di WA. Dimana seluruh karyawan yang ditugaskan perintah tersebut tidak melaksanakannya, maka akan mendapatkan teguran keras dari jajaran direksi. ([www.energyworld.co.id](http://www.energyworld.co.id))

PT. Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintah dan non pemerintah. Pasalnya, dalam laporan keuangan ditemukan kejanggalan. Auditor laporan keuangan, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional), juga dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan. Berikut seperti dirangkum Okezone, Jumat (28/6/2019). Semua berawal dari hasil Laporan Keuangan PT. Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS). Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi USD216,5 juta. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris PT. Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria (saat ini sudah tidak menjabat), menganggap laporan keuangan Tahun 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, PT. Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT. Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil jajaran direksi PT Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan

bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional). Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional). KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menuai polemik. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIAA itu, namun Kemenkeu masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. (<https://economy.okezone.com>).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan visi BUMN tahun 2002-2016 yakni menjadikan BUMN sebagai badan usaha yang tangguh dalam persaingan global dan mampu memenuhi harapan *stakeholder* (Tjager dkk, 2004). Dalam membahas penerapan *Good Governance* di institusi BUMN, peneliti berpendapat perlunya pemahaman yang mendasar terhadap perangkat serta mekanisme *governance* yang berlaku sebelum melakukan pembenahan BUMN agar dapat memberikan hasil yang optimal.

Mekanisme *Corporate Governance* dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya manajemen laba, salah satu indikatornya adalah membentuk komite audit. Pembentukan komite audit diatur secara resmi oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 Juli 2001 yang mewajibkan perusahaan tercatat memiliki komite audit, harus beranggotakan minimal tiga orang independen dan salah satunya memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan minimal melakukan empat kali pertemuan setahun. Tugas komite audit berhubungan dengan kualitas laporan

keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan. Investor sebagai pihak luar perusahaan tidak dapat mengamati secara langsung kualitas sistem informasi perusahaan (Teoh dan Wong, 1993). Oleh karena itu, persepsi mengenai kinerja komite audit yang diukur lewat latar pendidikan dan aktivitas komite akan mempengaruhi penilaian investor terhadap kualitas laba perusahaan.

Selain pembentukan komite audit, kepemilikan institusional menjadi salah satu bentuk pelaksanaan mekanisme *Corporate Governance*. Kepemilikan institusi memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang oportunistik melalui pengawasan intensif. Penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2005) dan Veronica dan Utama (2006) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap tindakan manajemen laba. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme kepemilikan institusional dapat memberikan kontribusi terhadap tindakan manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tarjo (2008), Indriastuti (2012), dan Subhan (2011) menyatakan hasil yang berbeda dimana kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Mekanisme *Good Corporate Governance* juga dapat dilakukan dengan kepemilikan manajemen dimana hal ini akan menunjukkan peran ganda seorang manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang

manajer sekaligus pemegang saham, maka ia tidak ingin perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan karena sehingga meminimalkan tindakan oportunistik dari manajer tersebut dalam proses pelaporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul:

**“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajemen, Latar Pendidikan Komite Audit dan Aktivitas Komite Audit terhadap Manajemen Laba”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan diteliti dapat dituangkan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah latar pendidikan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?
4. Apakah aktivitas komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk meneliti secara empiris :

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.
2. Pengaruh kepemilikan manajemen terhadap manajemen laba.

3. Pengaruh latar pendidikan komite audit terhadap manajemen laba.
4. Pengaruh aktivitas komite audit terhadap manajemen laba.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Memberikan bukti empiris apakah kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, latar pendidikan komite audit, dan aktivitas komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.
2. Bagi pihak berkepentingan lainnya, penelitian ini diharapkan dimanfaatkan sebagai informasi sesuai dengan kebutuhan.
3. Memberikan kontribusi ilmu akuntansi khususnya di bidang *good corporate governance* dan manajemen laba.
4. Dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
5. Dapat digunakan oleh para peneliti-peneliti berikutnya sebagai salah satu referensi dalam penelitiannya.